

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita Indonesia sejak dua tahun belakangan ini banyak dihembusi oleh angin demokrasi yang dipadatkan dalam bentuk berbagai keinginan dan tuntutan dengan mengatasnamakan rakyat. Keinginan untuk lepas dari pemerintahan yang terlalu lama berkuasa dan membentuk pemerintahan baru yang diharapkan membawa angin segar dalam berbagai segi kehidupan. Keinginan untuk mengedepankan sifat keterbukaan dalam berbagai isu nasional agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan bisa memonitor dan mengontrol secara langsung semua kebijakan yang dilakukan pemerintah. Keinginan untuk mengeluarkan pendapat secara lebih bebas. Keinginan untuk mendapatkan otonomi lebih besar dalam pengelolaan daerah. Semua ini dilapis dalam kata demokrasi, suara yang berasal dari rakyat.

Penyebab yang paling sering diajukan adalah menghubungkannya dengan kemerosotan kehidupan ekonomi negara yang jatuh akibat ketidakstabilan nilai mata uang rupiah terhadap dolar yang efek dominonya juga membuat kehidupan politik dan pemerintahan menjadi ikut goyah. Tetapi peneliti yakini faktor ekonomi ini hanya sebagai satu pemicu, penyebab yang utama adalah adanya tingkat pemikiran rakyat yang lebih baik, yang merupakan

produk keberhasilan program pendidikan. Pendidikan membuka cara berpikir setiap insan terhadap hidup yang berbudaya, kecanggihan teknologi, konsep kesamaan dalam perbedaan, persamaan hak dan kewajiban, dan harapan dalam hidup. Tingkat pendidikan yang lebih baik telah menggantikan sikap patuh dan diam dengan sikap kritis dan aktif. Inilah yang membangkitkan semangat reformasi untuk berdemokrasi di kalangan masyarakat khususnya generasi muda, yaitu salah satunya kaum pelajar terutama dalam kemampuannya mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajibannya di sekolah.

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan berhak berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan dapat kita peroleh di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan berjasa dalam membentuk pondasinya: rakyat yang tahu hak dan kewajibannya, rakyat yang mengakui persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, membuka kesempatan yang luas bagi semua lapisan masyarakat dalam mencapai persamaan, dan membentuk rakyat yang kritis. Dengan demikian pendidikan tidak saja memungkinkan tumbuhnya alam

demokrasi, tetapi juga membuat demokrasi menjadi hal yang utama untuk hadir di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan dari sistem pendidikan yang ada adalah pembenahan dalam cara mengajar. Cara mengajar yang hanya dititikberatkan pada penyampaian materi pelajaran (satu arah) harus dirubah dengan cara mengajar yang mengajak siswa untuk berpikir (dua arah). Berpikir secara mandiri dan bersama-sama dengan siswa lain dan guru sebagai satu kelompok. Berpikir dan mengemukakan hasil pemikirannya dalam bentuk pendapat kepada siswa lain dan guru. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk cara belajar yang interaktif.

Pendidikan yang interaktif bisa dilakukan dengan cara kerja kelompok untuk mendiskusikan satu topik tertentu, atau dimulai dengan teknik curah gagasan (*brainstorming*) yang melepaskan dahulu *justifikasi* terhadap *relevansi* ataupun kebenaran ide seseorang, tujuannya adalah mengumpulkan ide dari semua peserta. Kedua teknik tersebut akan memberi pengalaman pada siswa dalam mengeluarkan keberaniannya untuk mengemukakan pendapat dengan tujuan untuk berbagi dalam keterbukaan, dalam melihat kenyataan bahwa setiap orang belum tentu memiliki pendapat yang sama, dalam menyikapi dan menghargai pendapat siswa lain yang sealian maupun yang bertentangan, dalam menyikapi penolakan orang lain terhadap ide yang dikemukakan siswa yang bersangkutan, dalam mengolah ide orang lain menjadi lebih kreatif lagi, dan dalam bagaimana menggunakan jalur komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan dan masalah yang sedang dihadapi bersama.

Langkah selanjutnya adalah membawa siswa untuk beralih ke pemikiran tertulis. Siswa diberi kemampuan untuk menuangkan pendapatnya dalam bentuk karangan tertulis secara gamblang dan terstruktur. Ini akan membantu siswa dalam menyebarkan ide ke lingkup yang lebih luas. Karena bagaimanapun secara skala distribusi pemikiran yang tertulis akan lebih efektif untuk sampai ke khalayak yang lebih luas.

Inilah yang dimaksud dengan proses belajar yang sesungguhnya, memahami untuk *me-reinventing* apa yang dipelajari, menganalisa untuk *me-recreating* sesuatu dari yang sudah dipelajari, dan akhirnya menyatakan kembali kepada khalayak umum.

Untuk melaksanakan cara belajar interaktif pada kondisi sekarang cukup sulit, karena diperlukan faktor pendukung yang saat ini masih kurang dalam sistem pendidikan sekarang. Infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan pendidikan interaktif adalah:

1. Guru yang kompeten dan berbakat mendidik dan mengajar.
2. Meluangkan waktu terbanyak bagi pendidikan, terus belajar dan membaca, memilihkan soal analisa dalam proses belajar dan ulangan, memeriksa jawaban essai siswa dengan cermat dan memberi umpan balik, dan memberi porsi besar teknik diskusi dalam kegiatan belajar mengajar.
3. Bisa bertindak sebagai fasilitator dan mediator, selalu mempersiapkan bahan diskusi dengan tepat, memahami semua pendapat yang timbul, dan tahu cara menengahi perbedaan dengan tepat.

4. Tidak berorientasi hasil, melainkan berorientasi proses, tidak memusatkan perhatian pada keberhasilan dalam ujian tetapi pada proses belajarnya sehingga siswa memiliki kemampuan belajar mandiri yang tetap berorientasi pada kerjasama.
5. Materi pelajaran yang menekankan pada analisa masalah, tidak saja menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga keterampilan nilai, perilaku, emosi dan etika. Materi yang mampu melatih kemampuan otak, emosi dan aksi siswa secara seimbang.
6. Sistem penilaian yang proporsional pada nilai dan perilaku siswa, guru tidak hanya dinilai dari keberhasilan siswanya dalam memperoleh nilai baik dalam ulangan tetapi juga keberhasilan guru dalam membentuk perilaku siswa. Demikian juga dalam menilai keberhasilan siswa itu sendiri.
7. Sistem ujian nasional yang tidak didominasi pilihan ganda, sesuatu yang tidak merangsang siswa untuk berpikir secara kreatif.
8. Kehidupan sekolah yang lebih demokratis, yaitu dengan memerankan kembali kepala sekolah dan guru sebagai contoh hidup yang ideal, sebagai teman dalam berdiskusi, dan selalu melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan sekolah.

Harapan yang dibebankan pada keberhasilan sistem pendidikan ini adalah:

1. Terbentuknya siswa yang memiliki pengetahuan yang luas.
2. Terbentuknya siswa yang berkemampuan untuk menganalisa informasi di lingkungannya.
3. Terbentuknya siswa yang memiliki kesadaran akan kerjasama,

4. Terbentuknya siswa yang berkemauan untuk menyampaikan pendapatnya secara kritis.
5. Terbentuknya siswa yang memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan.
6. Terbentuknya siswa yang berorientasi pada berpikir dibandingkan menggunakan otot.
7. Terbentuknya siswa yang berorientasi pada aksi.
8. Terbentuknya siswa yang memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam lingkungannya.

Dengan target tersebut, diharapkan demokrasi bukan hanya membutuhkan pendidikan yang menghasilkan siswa yang melek huruf dan melek pengetahuan, tetapi juga pendidikan yang mampu memberi siswa kemampuan berinisiatif, bersikap kritis, kreatif, toleransi, dan berpartisipasi.

Salah satu mata pelajaran di sekolah yang sangat menekankan pada kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdapat materi yang khusus menjelaskan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat, jadi di dalam materi ini siswa dituntut memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat, salah satunya kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Harapannya siswa tidak hanya mampu dalam mengemukakan pendapatnya, tetapi mampu juga dalam mengaplikasikan hak dan kewajibannya di sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan atau kualitas guru, karena guru memiliki peranan penting dalam mengubah perilaku siswa. Pembinaan oleh guru di sekolah merupakan bagian integral dari upaya pembinaan kesadaran hukum atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pembinaan terhadap tata tertib sekolah merupakan salah satu bentuk kegiatan guru di sekolah dalam rangka pembinaan generasi muda dan pembentukan manusia disiplin dan terdidik. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, baik yang bersifat pengetahuan maupun sikap. Usaha pertama yang dilakukan oleh sekolah dalam pembinaan sikap yaitu melalui tata tertib sekolah. Sebagaimana diketahui dewasa ini banyak sekali siswa sekolah yang terlibat dalam kenakalan remaja, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, tawuran antar sekolah serta penggunaan etika yang salah dalam kehidupan. Oleh karena itu, melalui pembinaan tata tertib sekolah diharapkan siswa dibiasakan melaksanakan kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakatnya.

Hasil kajian sementara di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat perilaku siswa yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan di lihat dari perkembangan masyarakat global karena kemajuan pengetahuan dan teknologi, khususnya para siswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan berpengaruh negatif terhadap perilaku siswa. Peneliti mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 20 Bandar Lampung, hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

Tabel 1.1 Bentuk dan Jumlah Pelanggaran Tata Tertib Kelas VII Di SMP Negeri 20 Bandar Lampung Bulan Juli-Desember 2012.

No	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Sekolah	Jumlah Siswa
1.	Tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan	7
2.	Lompat pagar sekolah	3
3.	Meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran berakhir	7
4.	Terlambat hadir	10
5.	Tidak hadir tanpa keterangan	6
6.	Merokok	5
7.	Berkelahi	36
8.	Keluar saat KBM tanpa izin	12
9.	Mengaktifkan atau menggunakan HP pada jam KBM	8
10.	Ribut di kelas	10
	Total	105

Sumber: Dokumentasi guru BK di SMP Negeri 20 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013

Berdasarkan data, diketahui ada 105 siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa menunjukkan bahwa siswa tersebut masih kurang dapat mengaplikasikan pendapatnya tentang hak dan kewajibannya di sekolah. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah menunjukkan siswa kurang patuh terhadap peraturan sekolah. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan di sekolah sering kurang dihargai dan diperhatikan oleh siswa. Sekolah memegang peran yang sangat penting dalam menanamkan dan menumbuhkan aspek pendidikan moral. Kasus atau pelanggaran tata tertib sekolah tersebut terkait dengan karakteristik siswa seperti perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individu yang dipengaruhi oleh sikap, minat, keinsyafan, pengetahuan, dan faktor lain yang mempengaruhinya. Ketaatan terhadap tata tertib sekolah adalah sebuah

kesiapan yang harus ditanamkan kepada siswa di sekolah agar mempunyai sikap dan perbuatan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pelanggaran tata tertib yang terdapat pada tabel tersebut termasuk ke dalam bidang kajian nilai dan moral Pancasila. Hal tersebut termasuk ke dalam bidang kajian nilai dan moral Pancasila karena pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mengganggu kondisi lingkungan belajar di sekolah menjadi tidak kondusif. Bila generasi mudanya saja seperti ini, lalu bagaimana dengan nasib bangsa kita yang ada di tangan mereka. Seharusnya sebagai siswa yang memiliki kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajibannya di sekolah, siswa tersebut mampu mematuhi segala aturan-aturan yang ada, karena menaati tata tertib merupakan kewajiban siswa di sekolah, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan kericuhan dan kekacauan. Oleh karena itu, dari penelitian ini mengingatkan kembali bahwa siswa adalah generasi muda yang perlu dibimbing dan dibina dengan baik, agar siswa tidak hanya mampu mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajibannya di sekolah, tetapi juga mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban tersebut. Dengan harapan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada seluruh pihak-pihak yang bersangkutan baik itu sekolah maupun keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan Kemampuan

Mengemukakan Pendapat tentang Hak dan Kewajiban Siswa di Sekolah dengan Pelanggaran Tata Tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pentingnya pendidikan dalam menumbuhkan sikap demokrasi bagi generasi muda.
2. Peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina generasi muda.
3. Peranan guru dalam membina siswa.
4. Kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah.
5. Masih terdapat siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diajukan, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah.
2. Pelanggaran tata tertib sekolah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut “Adakah hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung?”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah menjelaskan adakah hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

2.1 Kegunaan teoritis

Kegunaan yang bersifat teoritik berkaitan dengan pengembangan khasanah pengetahuan, khususnya bagi program studi Pendidikan Kewarganegaraan. Kegunaan yang bersifat teoritis tersebut berupa sumbangan hasil penelitian, yaitu dapat menambah khasanah pengetahuan atau mengembangkan wawasan terutama dalam hal kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dan memberikan masukan guna pengembangan

dunia pendidikan serta memberikan masukan atau informasi bagi calon guru dalam meningkatkan diri agar lebih profesional.

2.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi siswa

Bagi siswa, penelitian ini berguna untuk memberikan motivasi atau dorongan agar siswa memiliki kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah yang selanjutnya dapat mengurangi pelanggaran tata tertib sekolah.

b. Bagi guru

Bagi guru, penelitian ini berguna untuk memperbaiki dan mengintrospeksi terhadap kemampuan, kualitas, dan keterampilan guru dalam melatih dan membimbing siswa, terutama dalam memberikan arahan tentang kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dan peraturan tata tertib sekolah.

c. Bagi sekolah

Bagi sekolah, penelitian ini berguna sebagai masukan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan sekolah dalam membantu siswa memiliki kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dan pentingnya mematuhi tata tertib sekolah, sehingga terwujud wawasan wiyata mandala yang baik.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan pada kajian nilai-nilai Pancasila dan norma kehidupan dalam hal mendidik generasi muda.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 20 Bandar Lampung yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah.

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah SMP Negeri 20 Bandar Lampung yang beralamat di jalan R. A. Basyid, Labuhan Dalam, kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai.